MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 547/DJMT/ST.KP7.1/X/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga teknis Hakim berkaitan dengan pemeriksaan sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 521/DJMT/SK.DL1.10/X/2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H./ 196907141991031006, Hakim Agung Ketua Kamar Tata Usaha Negara ;
2. Retno Ariyani, S.H., M.H./ 198403072008052002, Pembina (IV/a), Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;
3. Suryaningsih, S.Kom./ 198202112008052001, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganismintun;
4. Lidya Dayana Sakti Negara, S.H., S.E., M.M./ 198511072009122003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita Ditbinganismintun;
5. Meitina Kardina, S.E./ 198505152019032011, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganismintun;
6. Vinda Pratiwi, S.H./ 199209142025212048, IX, Penata Layanan Operasional;
7. Kurniawan/ 198301042025211027, V, Operator layanan Operasional.

Untuk : Melaksanakan tugas menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 yang bertempat di Hotel Grand Travello Bekasi, Jl. Grand Kota Bintang, RT.006/RW.017, Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Jawa Barat pada tanggal 4 sd. 6 November 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.